



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

KANTOR KECAMATAN GUMUKMAS

KABUPATEN JEMBER

PENDAHULUAN
KABUPATEN JEMBER
KANTOR CAMAT GUMUKMAS

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gumukmas Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Gumukmas disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Gumukmas ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Gumukmas berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Gumukmas. Kinerja Kecamatan Gumukmas diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Gumukmas Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gumukmas Tahun 2024.



Jember, 16 Januari 2024

Camat Gumukmas

NINO EKA PUTRA WAHYU R, S.STP, M.Si
Pembina

NIP. 198406242002121001

DAFTAR ISI

	Halaman:
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
C. KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN GUMUKMAS.....	2
D. SUMBERDAYA MANUSIA KECAMATAN GUMUKMAS	4
E. SARANA PRASARANA KECAMATAN GUMUKMAS	5
F. ANGGARAN KECAMATAN GUMUKMAS	8
G. ISU STRATEGIS	11
H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	16
C. PERJANJIAN KINERJA	20
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024.....	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJATAHUN 2024	23
B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN GUMUKMAS.....	24
C. ANALISA PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN.....	29
D. ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA	49
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN	50
F. REALISASI ANGGARAN	56
BAB IV. PENUTUP.....	60
LAMPIRAN :	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	62
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	65
Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	67
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD.....	75
Lampiran 5. Cascading kecamatan gumukmas.....	84

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Gumukmas disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Gumukmas tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gumukmas Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Gumukmas Tahun 2024.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Gumukmas dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Gumukmas

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Gumukmas tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat mendapat predikat baik karena sudah mendapatkan penilaian predikat 81,01 %

Sasaran 2 : 97,50% Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun (dapat disimpulkan karena sudah mendapatkan penilaian predikat baik)

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Gumukmas telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 indikator capaian Kinerja diatas target yaitu dalam kategori Sangat Tinggi dan memuaskan.

Faktor Keberhasilan pencapaian sasaran Kecamatan Gumukmas antara lain:

- Adanya sinergi, koordinasi, kolaboratif dan evaluasi dengan dinas lintas sector terkait. Salah satu Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Gumukmas adalah seluruh stakeholder, multi stakeholder melakukan analisa terhadap permasalahan

sehingga terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dan Tim Tangguh Bencana.

- Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan dinas lintas sektor terkait. Salah satunya yakni mengadakan patroli keliling yang diikuti oleh anggota Satpol PP Kecamatan Gumukmas, anggota Polsek Gumukmas, dan Anggota Koramil Gumukmas, Selain itu juga dengan mengaktifkan kembali siskamling untuk setiap desa.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 98,46% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 4.095.704.854,00 dan Belanja Modal sebesar 1,54% atau sebesar Rp 64.219.000,00

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.650.618.618,00 atau 87,76% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan adanya selisih harga

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia
2. Terbatasnya SDM sebagai pelaksana kegiatan
3. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait dengan pelaksana kegiatan

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Memenuhi Kebutuhan Sarana dan prasarana yang di butuhkan;
2. Koordinasi dari semua pihak Stakeholder Tingkat Kabupaten, dinas/instansi terkait dan pihak dari masyarakat yang ada di kecamatan wilayah Gumukmas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Gumukmas diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Gumukmas tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gumukmas dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya

di capai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Gumukmas adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Gumukmas
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN GUMUKMAS

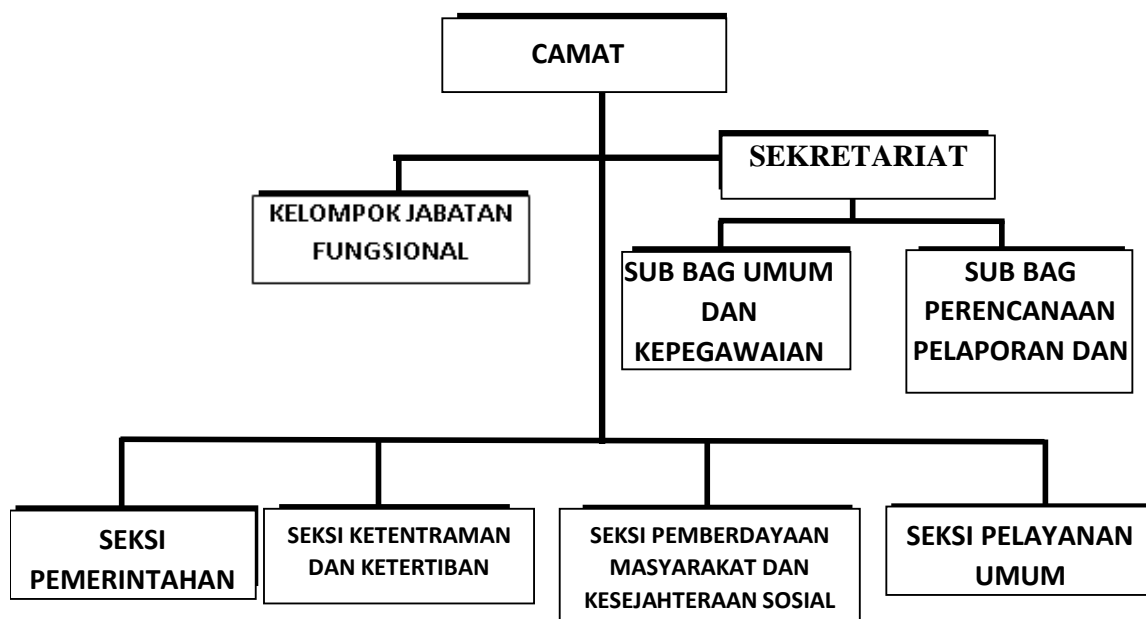
Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Gumukmas diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Gumukmas merupakan unsur Perangkat Daerah
- (2) Kecamatan Gumukmas dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dan memperoleh limpahan wewenang dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas pemerintahan umum.
- (3) Kecamatan Gumukmas mempunyai tugas :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan

- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kecamatan Gumukmas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasianterhadap seluruh program kerja dan kegiatan diwilayah kecamatan;
 - f. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan pemberian fasilitas penyusunan produk hukum desaberupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. pelaksanaan pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. pelaksanaan pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. pelaksanaan pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkatdesa;
 - k. pelaksanaan pemberianfasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa / kelurahan,penetapan dan penegasan data desa / kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah kecamatan;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu Kecamatan;

- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - q. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- (5) Susunan organisasi Kecamatan Gumukmas terdiri dari :
- a. Camat.
 - b. Sekretariat, Membawahi :
 - Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian; dan
 - Sub. Bag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GUMUKMAS
KABUPATEN JEMBER**



D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN GUMUKMAS

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Gumukmas yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Gumukmas yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 14 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 30 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 16 orang atau 53 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Gumukmas Tahun 2024**

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1				1		1					1	1	
Jabatan Administrasi														
Administrator	1				1		1					1	1	
Pengawas	6				6		4				4		4	
Pengelola	10				10									
Pelaksana	12		12				10		8		2		7	3
Jabatan Fungsional	0						0							
Non ASN							14	2	9	1	2		12	2
Jumlah	30		12	0	18		28		17	1	8	2	13	3

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Gumukmas 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Gumukmas belum memenuhi / ~~sudah memenuhi~~ jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Gumukmas

E. SARANA PRASARANA KECAMATAN GUMUKMAS

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Gumukmas menempati gedung di Jl. Achmad Yani Nomor 224 Gumukmas Telpn (0336) 321042.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Gumukmas Cukup memadai, karena Kecamatan Gumukmas memiliki Gedung / Bangunan Kantor yang cukup Luas, Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Gumukmas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Gumukmas
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
I	TANAH :	29		29
1	Tanah untuk bangunan tempat kerja	1	Baik	1
2	Tanah Untuk Jalan	28	Baik	28
II	GEDUNG DAN BANGUNAN :	10		10
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (Bangunan Pendopo)	1	Baik	1
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Paten)	1	Baik	1
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Bangunan Kantor)	1	Baik	1
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (Bangunan Gedung Pkk)	1	Baik	1
5	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen (Bangunan Rumah Dinas Camat)	1	Baik	1
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pintu Gerbang / Gapuro Kecamatan Gumukmas)	1	Baik	1
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Bangunan Toilet)	4	Baik	4
III	PERALATAN DAN MESIN :	414		421
1	A.C. Split	16	14 Baik dan 2 Rusak	16
2	Sofa single	4	Baik	4
3	Sofa double	1	Baik	1
4	Rak Kayu	28	Baik	28
5	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	2	Baik	2
6	Meja Kerja	44	Baik	44
7	Meja Rapat	9	Baik	9
8	Kursi Kerja	27	Baik	30
9	Kursi Rapat	163	Baik	200

10	Buffet Kayu (Lemari backdrop)	1	Baik	1
11	Dst.. ALAT KANTOR LAINNYA (Kursi tandem 4 org)	3	Baik	3
12	Lemari Kayu (Credensa general)	4	Baik	4
13	Lemari Besi/Metal	3	Baik	3
14	Lap Top	8	Baik dan Rusak 3	8
15	printer inkjet	12	Baik	12
16	camera digital	1	Baik	1
17	MOBIL Pickup (Mobil Operasional Pol PP)	1	Baik	1
18	SEPEDA MOTOR (Megapro)	1	Baik	1
19	MOBIL Avanza	1	Baik	1
20	Sepeda Motor (Kendaraan Dinas Kades)	8	Baik	8
21	Dst.. ALAT KANTOR LAINNYA (Meja Kursi Tamu)	3	Baik	3
22	Filing Cabinet Kayu (Almari Kayu)	10	Baik	10
23	Lemari Sorok (Almari Arsip)	1	Baik	1
24	Lemari Besi/Metal (Lemari Besi)	1	Baik	1
25	Bangku Tunggu	4	Baik	4
26	Brandkas	2	Baik	2
27	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik	1
28	Mimbar/Podium	1	Baik	1
29	Dst.. ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) (Generator Set)	1	Baik	1
30	Kipas Angin	3	Baik	3
31	Sound System (Chrimson)	1	Baik	1
32	TELEVISI LCD 42"	1	Rusak	1
33	TELEVISI LCD 32"	3	Rusak	4
34	Meja Resepsionis	1	Rusak	1
35	Filing Cabinet Besi	2	Cukup Baik	2
36	mesin jahit	1	Rusak	1
37	mesin obras	1	Rusak	1

38	Dst.. PERALATAN PERSONAL KOMPUTER (Meja Komputer)	1	Cukup Baik	1
39	Dst.. PERALATAN PERSONAL KOMPUTER (UPS / Stabilizer)	4	Rusak	4
40	P.C Unit	12	10 Baik dan Rusak 2	14
41	Hard Disk	1	Rusak	1
42	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	1
43	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	10	Baik	10
44	Layar Film/Projector	3	2 Baik dan 1 Rusak	3
45	LCD Projector/Infocus	1	Baik	2
46	Mesin Absen (Time Recorder)	1	Baik	1
47	Pompa Air	1	Baik	2
48	Router	1	Baik	2
49	Gerobak Dorong	1	Baik	1
50	Microphone Floor Stand	1	Baik	3
51	Tangga Aluminium	1	Baik	1
IV	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	30		30
1	Jalan Desa	28	Baik	28
2	Jalan Kabupaten Lokal	2	Baik	2
V	ASET TETAP LAINNYA	2		2
1	Buku Sejarah	2	Rusak	2
	JUMLAH	485		492

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Gumukmas Tahun 2024

F. ANGGARAN KECAMATAN GUMUKMAS

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Gumukmas pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Gumukmas memiliki 5 Program, 14 Kegiatan, dan 28 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.159.923.854,00,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Kecamatan Gumukmas

Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.941.849.254
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 3.042.500
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 3.042.500
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 2.412.909.854
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.296.003.854
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 115.500.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 1.406.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 37.200.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 37.200.000
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp. 76.630.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.601.800
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 4.609.300
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 18.689.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 3.793.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.852.400
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 43.084.000
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 64.219.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp. 14.841.900
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 49.377.100
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 208.762.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 67.008.340

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 141.754.360
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 139.084.800
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 35.486.600
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 29.189.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Rp. 3.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 17.976.500
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 53.432.700
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 751.725.800
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 742.400.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 742.400.000
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 9.325.800
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 9.325.800
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 92.899.400
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 58.176.600
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 6.746.800
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 51.429.800
3.2	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 34.722.800
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp. 34.722.800

4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 358.562.200
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 13.693.600
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 13.693.600
4.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 344.868.600
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 344.868.600
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 14.887.200
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 14.887.200
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 14.887.200
	JUMLAH	Rp. 4.159.923.854

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Gumukmas Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Gumukmas dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Gumukmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
2. Pelayanan Publik masih menjadi sektor yang lemah dalam reformasi birokrasi di kewilayahan, tingkat inovasi pelayanan masih sangat kurang sedangkan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang prima sangat tinggi;

3. Tata kelola pemerintahan di tingkat Kecamatan yang masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan yang lebih baik;
4. Kondisi sarana dan prasarana jaringan angkutan umum, baik jaringan jalan, jaringan energi, dan jaringan pengelolaan sampah yang masih jauh dari kondisi baik;
5. Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum dikelola dengan baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok masyarakat tertentu, menyebabkan potensi wisata tersebut belum dapat terkenal hingga seantero Kabupaten Jember bahkan se Indonesia jika dimungkinkan;
6. Tata Kelola produksi pertanian dan perkebunan yang belum baik, dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian dan perkebuna, sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Gumukmas;

H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Kecamatan Gumukmas terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian Barat dengan luas wilayah Luas wilayah Kecamatan Gumukmas adalah berkisar \pm 93,27 km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Umbulsari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Puger;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Kencong.

Jumlah penduduk di Kecamatan Gumukmas sebanyak 89.412 jiwa, penduduk laki laki sebanyak 45.160 Jiwa dengan persentase 50,51% dan penduduk perempuan sebanyak 44.252 Jiwa dengan persentase 49,49%. penduduk Kecamatan Gumukmas memiliki mata pencaharian antara lain :

1. Bidang Pertanian/Peternakan 24,37 % sebanyak 21.792 jiwa
2. Bidang Wiraswasta 21,89 % sebanyak 19.573 jiwa
3. Belum/Tidak Bekerja 26,33 % sebanyak 23.540 jiwa
4. PNS/Aparatur/Pejabat Negara 0,70 % sebanyak 624 jiwa
5. Tenaga Pengajar 0,67 % sebanyak 595 jiwa
6. Nelayan 0,14 % sebanyak 121 jiwa
7. Pelajar/Mahasiswa 10,21 % sebanyak 9.127 jiwa
8. Bidang Agama 0,04 % sebanyak 33 jiwa
9. Tenaga Kesehatan 0,11 % sebanyak 102 jiwa
10. Pensiunan 0,18 % sebanyak 162 jiwa

11. Bidang lainnya 15,37 % sebanyak 13.743 jiwa

Secara administratif, Kecamatan Gumukmas membawahi 8 desa yaitu:

1. Desa Kepanjen
2. Desa Mayangan
3. Desa Gumukmas
4. Desa Menampu
5. Desa Karangrejo
6. Desa Bagorejo
7. Desa Purwoasri
8. Desa Tembokrejo

Sumber Data : Kecamatan Gumukmas Dalam Angka (BPS)

- Wilayah Kecamatan Gumukmas ada 5 Desa yang berpotensi Rawan Bencana Banjir Ketika musim penghujan yaitu :

1. Desa Kepanjen
2. Desa Mayangan
3. Desa Gumukmas
4. Desa Karangrejo
5. Desa Bagorejo

Dan ada 1 Desa yang rawan bencana angin Putting Beliung yaitu :

Desa Tembokrejo

- Wilayah Kecamatan Gumukmas ada 5 Desa yang memiliki potensi wisata local yaitu :

1. Desa Purwoasri (Situs Candi Deres)
2. Desa Kepanjen (Pantai Selatan)
3. Desa Mayangan (Pantai MACEMA)
4. Desa Bagorejo (Kolam Renang)
5. Desa Tembokrejo (Umbul Jonggrang dan Puncak Gunung Tri Anggulasi)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Gumukmas merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akселerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Gumukmas Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Gumukmas yaitu :

Misi : Ke -2 Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Tujuan : Ke - 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif melalui Sinergi dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran RPJMD :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
- b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Gumukmas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Gumukmas
Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator Tujuan 1 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	85	85	90	95	98
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100	80	80	84	86	88
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kecamatan	Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat						
-----------	---	--	--	--	--	--	--

Sumber : Tabel TC 25 Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Gumukmas tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 2 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Tabel TC 25 Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Gumukmas tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : Dokumen LAKIP Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

<p>Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Penjelasan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : Kesesuaian persyaratan Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Waktu penyelesaian Biaya / tarif Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan pengaduan , saran dan masukan Kualitas sarana dan prasarana</p>	<p>Seksi Pemerintahan Seksi Pelayanan Umum Seksi PMKS Seksi Trantib</p>	<p>SUKMA-E</p>
<p>Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan</p>	<p>Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan</p>	<p>Formulasi Kegiatan : $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$ Penjelasan : Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan</p>	<p>Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>

		pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat		
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator: Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Laporan ataupun media sosial kecamatan.</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan indikator: Nilai SAKIP PD adalah Nilai hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP PD yang nilainya dilakukan oleh Evaluator Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada permenPANRB nomor</p>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) PD

		88 tahun 2021 dan pedoman evaluasi internal di Pemkab Jember		
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Gumukmas No. 065/24/35.09.04/2024 tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Gumukmas Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Gumukmas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	84%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien	NILAI SAKIP OPD	BB (80)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Gumukmas tahun 2024

Program	Anggaran	Sumber Dana
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.941.849.254	APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 751.725.800	APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 92.899.400	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 358.562.200	APBD
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 14.887.200	APBD
Jumlah	Rp. 4.159.923.854	

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Gumukmas terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp. 751.725.800

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 751.725.800 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 18,07% dari keseluruhan belanja Kecamatan Gumukmas.

b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Anggaran Rp. 92.899.400

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 92.899.400 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 2,23% dari keseluruhan belanja Kecamatan Gumukmas.

c) Sasaran Strategis III : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp. 358.562.200

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Anggaran Rp. 14.887.200

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 373.449.400 yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 8,98% dari keseluruhan belanja Kecamatan Gumukmas.

d) Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 2.941.849.254

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 2.941.849.254 yang dialokasikan untuk sasaran IV adalah sebesar 70,72% dari keseluruhan belanja Kecamatan Gumukmas.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Gumukmas dalam merealisasikan target - target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Gumukmas menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN GUMUKMAS

Kecamatan Gumukmas telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Gumukmas tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Gumukmas dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	81,01	90,01%	98	82,66%
2	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	84%	84%	100%	88%	95,46%
3	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Efektifitas	Persentase Indikator	100%	100%	100%	100%	100%

Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Program yang tercapai						
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4	4	100%	4	100%	
Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien	NILAI SAKIP OPD	83	86,44	104%	88	98,22%	

Sumber Data Realisasi :

1. Perjanjian Kinerja 2024
2. Indek Kepuasan Masyarakat (E Sukma)
3. Laporan Realisasi Kinerja APBD 2024
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 indikator sasaran Kecamatan Gumukmas rata rata mencapai 97,50% dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan **progress positif**, (semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya) Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Gumukmas telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pelayanan kepada masyarakat / Pelayanan Publik secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Gumukmas tahun 2021 - 2026.

Perhitungan data realisasi per sasaran adalah sebagai berikut :
Realisasi Sasaran 1 :

berdasarkan data realisasi program Kecamatan Gumukmas th 2024

Persentase Indikator Program yang tercapai =

$\frac{4 \text{ IK program yang tercapai}}{5 \text{ IK program}} \times 100\% = 80\%$

5 IK program

Angka realisasi ini telah belum mencapai target tahun 2024

Realisasi sasaran 2 :

Berdasarkan data SKM yang ditarik dari SUKMA Jatim pada akun Kecamatan Gumukmas per 31 Desember 2024, didapatkan IKM sebesar 81,01, dimana IKM tersebut belum sesuai dengan target IKM di tahun 2024

Realisasi sasaran 3 :

berdasarkan data pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan masyarakat , maka realisasi indikator sasaran 3 sbb

Persentase fasilitasi kesmas yang dilaksanakan =

$$\frac{183 \text{ keg fasilitasi yang dilaksanakan}}{183 \text{ keg fasilitasi yang direncanakan}} \times 100\% = 100\%$$

183 keg fasilitasi yang direncanakan

Realisasi ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%

Kegiatan kegiatan Fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang direncanakan di tahun 2024 antara lain:

- Pembagian bantuan 6 dari 6
- Pelatihan 2
- Pendampingan 144
- Pendampingan tenaga puskesmas untuk 4
- Penimbangan balita rutin sebanyak 11
- Rembuk stunting di Desa dan Kecamatan 9
- Pelatihan UMKM dan Pengolahan Bahan Makanan 2
- Penyediaan Fasilitas Rakor TPPS dan Monev 5

Realisasi sasaran 4 : berdasarkan data laporan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat kecamatan Gumukmas tahun 2024 , maka realisasi indikator sasaran 4 sbb

Persentase penyelesaian laporan pelanggaran trantibum yang dilaksanakan =

$$\frac{64 \text{ laporan yang terselesaikan}}{64 \text{ laporan pelanggaran yang masuk}} \times 100\% = 100\%$$

64 laporan pelanggaran yang masuk

Menunjukkan bahwa seluruh laporan pelanggaran telah terselesaikan dengan baik, sesuai ketentuan dan SOP yang ada

Laporan pelanggaran trantibum di tahun 2024 antara lain:

- Laporan perselisihan waris di desa sebanyak 3 Laporan
- Laporan pelanggaran asusila sebanyak 5
- Laporan pelanggaran ketertiban umum sebanyak 29 Laporan
- Pengaduan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) sebanyak 3 laporan;

- Pengaduan tentang Penerangan Jalan Umum sebanyak 6 laporan;
- Pengaduan tentang pembayaran pajak terhadap obyek pajak tetapi tidak dibayarkan oleh petugas pungut sebanyak 1 laporan;
- Pengaduan tentang Hotel dan Tempat Karaoke yang mengganggu lingkungan sebanyak 1 laporan;
- Perselisihan tentang normalisasi sungai bondoyudo alur lama 1 laporan;
- Pengamanan penyampaian aspirasi masalah jalan propinsi lumajang jember yang dilewati kendaraan yang melebihi tonase 2 laporan;
- Apel dan pembinaan linmas dalam rangka pengaman pemilu dan pilkada tahun 2024 4 laporan;
- Pengamanan pemilu dan pilkada 2 laporan;
- Kegiatan mitigasi kebencanaan 4 laporan;
- Penanganan bencana akibat hujan dan angin 3 laporan.

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,58	93,33	88,05	81,01
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	80%	100%	84%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	79%	62,7%	100%	100%
Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	0	100%	92,8%	100%

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah				
Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien	NILAI SAKIP OPD				86,44 (BB)

Sumber Data Realisasi:

1. Perjanjian Kinerja Perubahan 2023
2. Indek Kepuasan Masyarakat (E Sukma)
3. Laporan Konsistensi SKPD kecamatan Gumukmas Tahun 2022 (SIPPD)
4. Laporan Konsistensi SKPD kecamatan Gumukmas Tahun 2023 (SIPPD)
5. Laporan Konsistensi SKPD kecamatan Gumukmas Tahun 2024 (SIPPD)

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Gumukmas dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,01	87,33 (IKM Kab. Jember)	
	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	84%		

Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman	100%		
Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%		
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana			
Meningkatnya Kualitas pengelolaan	NILAI SAKIP OPD	86,44 (BB)	62,50 (nilai SAKIP Kab. Jember)	

Sumber Data: Data Realisasi Kinerja Kec Gumukmas; SUKMA-e Kecamatan Gumukmas; Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jember Th.2024, LHE AKIP Kab. Jember th. 2024

Dari enam indikator Kecamatan Gumukmas, sebanyak empat indikator tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten atau realisasi Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama. Untuk indikator IKM, Realisasi IKM Kecamatan Gumukmas tahun 2024 lebih rendah sebesar 6,32 poin dibandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Jember tahun 2024. Dimana hasil tersebut menunjukkan pelayanan di Kecamatan Gumukmas kurang optimal dalam mendukung kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jember. Sedangkan untuk indikator Nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Gumukmas tahun 2024 lebih tinggi 23,94 poin dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Jember.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.6
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan	Program A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	751.725.800	745.100.000	99,12%

Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Kegiatan A.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	742.400.000	738.200.000	99,43%
	Kegiatan A.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.325.800	6.900.000	73,99%
	Sub Kegiatan A.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	742.400.000	738.200.000	99,43%
	Sub Kegiatan A.2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.325.800	6.900.000	73,99%
Total		751.725.800	745.100.000	99,12%
Sasaran 2 : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Program A. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	92.899.400	89.862.000	96,73%
	Kegiatan A.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.176.600	55.780.000	95,88%
	Kegiatan A.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	34.722.800	34.082.000	98,15%
	Sub Kegiatan A.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.429.800	49.638.000	96,52%
	Sub Kegiatan A.1.2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.746.800	6.142.000	91,04%
	Sub Kegiatan A.2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga,	34.722.800	34.082.000	98,15%

	dan Kelompok Masyarakat			
Total		92.899.400	89.862.000	96,73%
Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Program A. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	358.562.200	347.579.000	96,94%
	Kegiatan A.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.693.600	13.592.000	99,26%
	Kegiatan A.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	344.868.600	333.987.000	96,84%
	Sub Kegiatan A.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.693.600	13.592.000	99,26%
	Sub Kegiatan A.2. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	344.868.600	333.987.000	96,84%
Total		358.562.200	347.579.000	96,94%
	Program B. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.887.200	14.678.400	98,60%
	Kegiatan B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.887.200	14.678.400	98,60%
	Sub Kegiatan B. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.887.200	14.678.400	98,60%
Total		14.887.200	14.678.400	98,60%

Sasaran 4. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Program A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.941.849.254	2.453.399.218	83,40%
	Kegiatan A.1. Perencanaan, Pengagaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.042.500	2.892.500	95,07%
	Kegiatan A.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.412.909.854	1.982.897.627	82,18%
	Kegiatan A.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.200.000	33.150.000	89,11%
	Kegiatan A.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.630.400	62.059.013	80,98%
	Kegiatan A.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.219.000	62.900.000	97,95%
	Kegiatan A.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.762.700	180.690.545	86,55%
	Kegiatan A.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139.084.800	128.809.533	92,61%
	Sub Kegiatan A.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.042.500	2.892.500	95,07%
	Sub Kegiatan A.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.296.003.854	1.868.378.127	81,38%
	Sub Kegiatan A.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.500.000	113.480.000	98,25%
	Sub Kegiatan A.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024	1.406.000	1.039.500	73,93%
	Sub Kegiatan A.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas	37.200.000	33.150.000	89,11%

	beserta Atribut Kelengkapannya			
	Sub Kegiatan A.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.601.800	3.571.000	99,14
	Sub Kegiatan A.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.689.400	18.051.200	96,59
	Sub Kegiatan A.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.793.500	3.657.500	96,41
	Sub Kegiatan A.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.609.300	4.592.500	99,64
	Sub Kegiatan A.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	2.852.400	2.386.250	83,66
	Sub Kegiatan A.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.084.000	29.800.563	69,17
	Sub Kegiatan A.5.1. Pengadaan Mebel	14.841.900	14.800.000	99,72
	Sub Kegiatan A.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.377.100	48.100.000	97,41
	Sub Kegiatan A.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.008.340	52.778.593	78,76
	Sub Kegiatan A.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.754.360	127.911.952	90,23
	Sub Kegiatan A.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.486.600	34.527.800	97,30
	Sub Kegiatan A.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.189.000	27.902.300	95,59

Sub Kegiatan A.7.3. Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	100
Sub Kegiatan A.7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.976.500	16.910.000	94,07
Sub Kegiatan A.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	53.432.700	46.469.433	86,97
Total	2.941.849.254	2.453.399.218	83,40

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran : 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	742.400.000	738.200.000
Output	Jumlah dokumen....	Dokumen	12	12

Foto Kegiatan





Keterangan :

- Pembinaan Rt/Rw di Desa Kepanjen, Nara Sumber Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- Pembinaan Rt/Rw di Desa Menampu, Nara Sumber Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- Pembinaan Rt/Rw di Desa Bagorejo, Nara Sumber Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- Pembinaan Rt/Rw di Desa Karangrejo, Nara Sumber Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- Pembinaan Rt/Rw di Desa Tembokrejo, Nara Sumber Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- Pembinaan Rt/Rw di Desa Purwoasri, Nara Sumber Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- Pembinaan Rt/Rw di Desa Gumukmas, Nara Sumber Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- Pembinaan Rt/Rw di Desa Mayangan, Nara Sumber Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	9.325.800	6.900.000
Output	Jumlah dokumen....	Dokumen	12	12

Foto Kegiatan



Keterangan :

- Forum Konsultasi Publik Kecamatan Gumukmas di Aula PKK Kecamatan Gumukmas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Pemerintah Kecamatan Gumukmas bekerjasama dengan Pengadilan Agama dan Dispendukcabil Kabupaten Jember, mengadakan Sosialisasi Adminduk dan Itsbat Nikah di Pendopo Praja Mukti Kec. Gumukmas.
- Pengadilan Agama Kabupaten Jember Kelana Desa Tahun 2024 kembali dilaksanakan di Gumukmas Kecamatan Gumukmas. Kali ini kegiatan tersebut dilaksanakan di Pendopo Praja Mukti Kantor Kecamatan Gumukmas.

- Berdasar Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA, kali ini Dispendukcapil Jember melaksanakan kegiatan jemput bola di Kecamatan Gumukmas.
- Pemerintah Kecamatan Gumukmas bekerjasama dengan Dispenduk dan Pemerintah Desa, selama 2 hari melaksanakan kegiatan J-PEDULI KAMU di Wilayah Ke Gumukmas.
- Pengadilan Agama Kabupaten Jember mengadakan Kelana Desa Tahun 2024 di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas. Hal ini dikarenakan di Desa Gumukmas warganya sangat antusias

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran : 2. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan adalah sebagai berikut :

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	51.429.800	49.638.000
Output	Jumlah dokumen....	Dokumen	12	12

Foto Kegiatan



Keterangan :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembangunan Desa Tembokrejo
- Mengikuti Program Kegiatan Jember Bershodaqoh

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	6.746.800	6.142.000
Output	Jumlah	Lembaga	8	8

Foto Kegiatan



Keterangan :

- Dalam Rangka Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan, maka Kecamatan Gumukmas Mengadakan Pra Musrenbang
- Dalam rangka menyusun program tahunan pemerintahan Desa, maka Kecamatan Gumukmas Mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan ditingkat Kecamatan.
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Desa

Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	34.722.800	34.082.000
Output	Jumlah	Keluarga	10	10

Foto Kegiatan



Keterangan :

- Dalam rangka penguatan Organisasi TP-PKK Kecamatan Gumukmas Mengadakan Pertemuan Rutin setiap bulan
- Pembinaan administrasi PKK dan Public Speaking
- Kunjungan Ibu Hamil
- Pertemuan Rutin TP-PKK Tingkat Kecamatan
- Pelatihan Konselor ASI
- Aktivasi BKB, BKR, BKL

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran : 3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
 Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	13.693.600	13.592.000
Output	Jumlah dokumen....	Dokumen	12	12

Foto Kegiatan



Keterangan :

- Pendampingan Kegiatan Audensi dan Mediasi Permasalahan Sewa Tanah Kas Desa (TKD) dan Kinerja Pemerintah Desa Gumukmas. Ini dilaksanakan karena ada tuntutan dari warga yang mengatasnamakan GAMAS (Gerakan Masyarakat Gumukmas) terkait Tanah Kas Desa Gumukmas. Akhirnya dalam audensi dan mediasi tersebut telah diberikan klarifikasi oleh pihak Pemerintah Desa. Audensi dan Klarifikasi ini ditunda karena adanya pihak-pihak terkait yang telah diundang tidak hadir. Pihak GAMAS memberikan waktu untuk Pemerintah Desa agar secepatnya mengundang dan mempertemukan kembali pihak yang sekarang hadir dan pihak yang tidak hadir agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan.

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
 Kepala Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan
 Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau
 Kepolisian Negara Republik Indonesia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	344.868.600	333.987.000
Output	Jumlah dokumen....	Dokumen	12	12

Foto Kegiatan







Keterangan :

- Operasi ini mengacu pada Surat Edaran (SE) Bupati Jember Nomor 400 Tahun 2024 tentang Himbauan Kegiatan di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah, dimana seluruh tempat hiburan seperti karaoke, public house, diskotik, dan rumah biliar untuk menghentikan kegiatannya. Operasi ini dimulai pukul 21.00 sd 23.00 WIB, dan yang menjadi fokus operasi ini adalah Hotel GGM dan Tempat Karaoke Asyka Gumukmas.

- Mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok ketika bulan Ramadhan Camat Gumukmas bersama Kepala Desa Mayangan melaksanakan sidak ke salah satu pasar tradisional yang ada di Kecamatan Gumukmas. Sidak berlangsung di Pasar Mayangan Kecamatan Gumukmas.
- Pemantauan dan Pengamanan Pelepasan Satwa Monyet Ekor Panjang dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Cabang Jember, yang melepas 40 monyet ekor panjang ke habitat aslinya di Pulau Nusa Barong Kec. Puger melalui pantai Nyamplung Kobong Desa Kepanjen Kec. Gumukmas.
- Monyet-monyet didapatkan dari masyarakat yang sebelumnya dipekerjakan tidak sesuai dengan habitatnya. Begitu disita, hewan primata itu ditangkarkan di Cikole Lembang, Bandung, selama 2 tahun. Penangkaran dilakukan oleh JAAN (Jakarta Animal Aid Network), sebuah lembaga pecinta binatang khusus monyet. Setelah dua tahun dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, barulah dikembalikan ke habitatnya.
- Pelaksanaan Kegiatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Renungan Suci, Tabur Bunga dan Upacara Pengibaran serta Penurunan Bendera Merah Putih

2. Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	14.887.200	14.678.400
Output	Jumlah dokumen....	Dokumen	6	6

Foto Kegiatan





Keterangan:

- Rapat Koordinasi dan sosialisasi pajak Daerah di hadiri oleh Kepala Kantor perpajakan dan semua Kepala Desa
- Rapat Koordinasi dan Pisah Kenal Danramil Gumukmas di hadiri oleh Muspika Kecamatan dan Perangkat Desa warga masyarakat
- Rapat Koordinasi usulan Desa Anuhgerah Patriot di hadiri oleh Muspika Kecamatan dan Perangkat Desa warga masyarakat
- Rapat Koordinasi Pembinaan pereangkat Desa di hadiri oleh Muspika Kecamatan dan semua perangkat Desa

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran : 4. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Pengagaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	3.042.500	2.892.500
Output	Jumlah dokumen....	Dokumen	4	4

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	2.296.003.854	1.868.378.127
Output	Jumlah	Orang/bulan	17	15

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	115.500.000	113.480.000
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	12	12

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	1.406.000	1.039.500
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	2	2

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	37.200.000	33.150.000
Output	Jumlah	Paket	1	1

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	3.601.800	3.571.000
Output	Jumlah	Paket	1	1

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	18.689.400	18.051.200
Output	Jumlah	Paket	1	1

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	3.793.500	3.657.500
Output	Jumlah	Paket	1	1

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	4.609.300	4.592.500
Output	Jumlah	Paket	1	1

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	2.852.400	2.386.250
Output	Jumlah	Paket	1	1

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	43.084.000	29.800.563
Output	Jumlah	Laporan	12	12

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	14.841.900	14.800.000
Output	Jumlah	Unit	2	2

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	49.377.100	48.100.000
Output	Jumlah	Unit	6	6

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	67.008.340	52.778.593
Output	Jumlah	Laporan	12	12

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	141.754.360	127.911.952
Output	Jumlah	Laporan	1	1

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	35.486.600	34.527.800
Output	Jumlah	Unit	1	1

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	29.189.000	27.902.300
Output	Jumlah	Unit	2	2

Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	3.000.000	3.000.000
Output	Jumlah	Unit	6	6

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	17.976.500	16.910.000
Output	Jumlah	Unit	20	20

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	53.432.700	46.469.433
Output	Jumlah	Unit	4	4

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Gumukmas berjumlah 28 orang (PNS : 14 Orang dan Non PNS 14 Orang), dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.159.923.854, melaksanakan 5 program 14 kegiatan dan 28 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	90,01	99,12	Efisien / Tidak Efisien
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	100	96,73	Efisien/ Tidak Efisien
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	100	97,77	Efisien/ Tidak Efisien
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100	83,40	Efisien/ Tidak Efisien
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	100	97,87	Efisien/ Tidak Efisien

Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif dan efisien	86,44	83,40	Efisien/ Tidak Efisien
---	-------	-------	------------------------

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan dapat dikategorikan efisien/tidak efisien karena % capaian kinerja (~~lebih besar~~ / lebih kecil) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan dapat dikategorikan efisien/~~tidak efisien~~ karena % capaian kinerja (~~lebih besar~~ / lebih kecil) daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Gumukmas menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / ~~kegagalan~~) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	90,01%					
Indikator 1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat						
Sasaran 2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	100%					
Indikator 1.1. Persentase Fasilitas Kesejahteraan						

masyarakat yang dilaksanakan						
Sasaran 3 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	100%					
Indikator 1. Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat						
Sasaran 4 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100%					
Indikator 1. Persentase Indikator Program yang tercapai	100%					
Sasaran 5 Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						
Indikator 5. Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah						
Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien						
Indikator 6. NILAI SAKIP OPD						

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 90,01 %, Penyebab keberhasilan antara lain :

- Adanya Sarpras yang lengkap, guna menunjang dengan pelayanan yang ada di pelayanan Umum / Adminduk
- Tenaga / SDM yang terampil di bidangnya
- Pelayanan Ramah kepada masyarakat

Solusi terhadap kendala kedepan diharapkan khususnya ketersediaan Blangko E-KTP di Disdukcapil kabupaten Jember di tahun 2025 bisa terpenuhi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Rencana perbaikan kedepan apa :

- Mengkoordinasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya menyediakan blangko E-KTP sesuai Permintaan Masyarakat.
- Meningkatkan komunikasi kepada masyarakat dan sosialisasi secara massif terkait kondisi dimana blanko e-KTP belum tersedia

Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain :

- Dengan masih banyak E-KTP, KIA, KK dan Akte Kelahiran yang belum di ambil oleh masyarakat sehingga Pihak Kecamatan dalam hal ini berkolaborasi dengan lintas sektor untuk menuntaskan menumpuknya E-KTP, KIA, KK dan Akte Kelahiran yang ada di kantor Pelayanan Umum / Adminduk dengan membuat Inovasi / gagasan Istilah Turun ke bawah (TURBAH)
- Program TURBA yakni :
- Membagikan E-KTP langsung kepada yang bersangkutan.
- Membagikan KK langsung kepada yang bersangkutan.
- Membagikan KIA & Akte Kelahiran langsung kepada yang bersangkutan.
- Dengan masih banyaknya masyarakat kecamatan Gumukmas khususnya lansia dan penyandang disabilitas yang masih belum melakukan perekaman EE-KTP, pemerintah kecamatan Gumukmas berkolaborasi dengan Disdukcapil kabupaten Jember meluncurkan program J-Peduli Kamu dengan mendatangi langsung kerumah yang bersangkutan.

- Untuk mempercepat kepemilikan adminduk (E-KTP, KIA, KK, Akte Kelahiran dan Akte Kematian) bagi masyarakat, maka pemerintah kecamatan Gumukmas berkolaborasi dengan Disdukcapil Kabupaten Jember meluncurkan program J-Monalisa.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

- a. Permasalahan rumah yang tidak layak huni bagi keluarga miskin
- b. Permasalahan dengan penerima sasaran yang masih kurang tepat sasaran
- c. Permasalahan masih ada kasus Balita Stunting dan Bumil Risti / KEK
- d. Permasalahan masih ada bencana Banjir
- e. Permasalahan terkait kelengkapan perijinan UMKM

Faktor pendorong keberhasilan antara lain :

- a. Faktor terkait dengan Rumah yang Tidak Layak Huni bagi keluarga Miskin telah berkolaborasi dengan PU Cipta Karya dalam program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- b. Untuk penanganan faktor penyaluran Bansos yang kurang tepat sasaran maka dilakukan verifikasi data ulang bersama Desa, Pendamping Puskesmas Desa dan Pendamping PKH.
- c. Dalam Penanganan mulnya kasus stunting bayi dan Bumil KEK/Resti maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut :
 - Diadakannya rembuk Stunting Tingkat Desa
 - Diadakannya rembuk Stunting Tingkat Kecamatan
 - Diadakannya rapat TPPS tingkat Desa dan Kecamatan dengan menyertakan Lintas Sektor
 - Dilakukan kegiatan Monev TPPS Desa setiap 3 (tiga) bulan sekali
 - Dilakukan kegiatan Monev TPPS tingkat Kabupaten
- d. Secara Rutin mendorong desa untuk melakukan kerja bakti bersama masyarakat.
- e. Untuk mendorong keberhasilan UMKM di Kecamatan Gumukmas, maka diadakan Rakor UMKM se-Kecamatan Gumukmas dengan menghadirkan narasumber dari Diskop Kabupaten Jember dan pihak ketiga pelaku UMKM yang sudah berhasil.

Solusi terhadap kendala kedepan adalah :

- a. Dengan memverifikasi ulang data masyarakat miskin yang masih belum terkafer di data DTKS untuk segera dilakukan update data di program DTKS.
- b. Untuk penganan kemiskinan kita berkolaborasi pihak Dinas Sosial Kabupaten Jember
- c. Evaluasi dan validasi data DTKS Desa
- d. Pengadaan PMT Pemulihan Balita Stunting dan Bumil Kek/Resti serta PMT Penyuluhan di Posyandu.
- e. Mengidentifikasi sungai-sungai yang perlu dilakukan normalisasi
- f. Mengedukasi masyarakat sadar membuang sampah pada tempatnya.
- g. Pembuatan bank sampah organik dan non organik di masing-masing desa
- h. Dalam rangka mengatasi kesulitan / masalah terkait dengan kepemilikan ijin usaha maka kan diadakan pertemuan terkait permasalahan UMKM

Rencana perbaikan kedepan :

- a. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dengan Pemerintahan Desa agar setiap Desa mempunyai data kemiskinan yang lebih jelas dan akurat sehingga setiap saat ada program dari kabupaten Jember kita lebih cepat menyediakan data diperlukan.
- b. Validasi data penerima bantuan, dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan semua masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan sudah terkafer di data DTKS di desa masing-masing
- c. Mengoptimalkan semua desa untuk lebih serius dalam penganan kasus Balita Stunting dan Bumil Kek/ Resti.
- d. Normalisasi sungai dan saluran irigasi.
- e. Mengusulkan pelatihan bagi UMKM dengan harapan UMKM mampu berdaya bersaing di era globalisasi.

Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain Dalam rangka penanganan kasus Stunting dan Bumil Kek/ Resti, Kecamatan Gumukmas berkolaborasi dengan Puskesmas dan Desa telah meluncurkan program Gumukmas Optimis Bebas Stunting (GO-BESTI).

Sasaran Strategis 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

1. Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat;
2. Masih rendahnya penegakan hukum;
3. Masih rendahnya pelayanan penanganan kebakaran.
4. Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada;
5. Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
6. Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda;
7. Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran

Solusi terhadap kendala kedepan adalah :

1. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat kepada masyarakat secara berkelanjutan agar masyarakat lebih menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya;
 2. Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing;
 3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah;
 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 5. Menurunkan resiko bencana, dengan memberikan sosialisasi secara berkelanjutan tentang mitigasi bencana.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain :
1. Peningkatan pelaksanaan pembinaan, mediasi, komunikasi dan penindakan pelanggaran Perda dan peraturan Gubernur. Dengan mengedepankan beberapa upaya yang diawali dengan tindakan pre-emptif, preventif seperti pembinaan, mediasi dan komunikasi;
 2. Meningkatkan pengendalian gangguan tibus tranmas, dengan melaksanakan pembinaan tranmas dan monitoring pendataan daerah rawan tramtib
 3. Meningkatkan sinergitas Satpol PP/Staf Trantibus Kecamatan dengan Satlinmas Desa;
 4. Meningkatkan ketertiban, ketenteraman dan pencegahan tindak kriminal;
 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memelihara ketertiban, ketenteraman dan keamanan;

6. Meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP/Trantibum Kecamatan dengan penguatan manajemen internal yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %, Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

- Faktor pendorong keberhasilan antara lain Kompetensi pegawai, suasana kerja dan lingkungan kerja yang baik, peluang pengembangan karier. Adapun penghambat pencapaian kinerja adalah a. Komunikasi yang kurang baik b. konflik antara pegawai c. Kurangnya disiplin d. Motivasi kerja e. Gaji dan insentif f. Lingkungan kerja g. Kegagalan sistem seperti jaringan yang kurang bagus.

Solusi terhadap kendala dan rencana perbaikan kedepan adalah :

- meningkatkan kompetensi SDM agar memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan dominan masalah, memiliki pemikiran yang kreatif dan fleksibel, berkolaborasi dengan orang lain, dan memiliki waktu yang cukup untuk didedikasikan untuk memecahkan masalah.
- Koordinasi internal agar seluruh aparatur Fokus pada pekerjaan, jaga Kesehatan, gunakan waktu kerja secara maksimal, berkolaborasi, bangun system komunikasi yang efektif, Evaluasi kinerja secara berkala, ciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan positif.

Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain :

1. Memberikan tugas sesuai dengan kemampuan, berikan pelatihan atau training kerja yang relevan dan berikan penghargaan dan pengakuan untuk memotivasi karyawan.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gumukmas, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 4.159.923.854 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 4.095.704.854 terealisasi sebesar Rp. 3.587.718.618,00,- (87,60 %)

2. Belanja Modal sebesar Rp. 64.219.000 terealisasi sebesar Rp. 62.900.000,00,- (97,95%)

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Kecamatan Gumukmas Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.941.849.254	2.453.399.218	83,40
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3.042.500	2.892.500	95,07
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	0	0	0
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	3.042.500	2.892.500	95,07
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.412.909.854	1.982.897.627	82,18
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.296.003.854	1.868.378.127	81,38
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.500.000	113.480.000	98,25
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024	1.406.000	1.039.500	73,93
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.200.000	33.150.000	89,11
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.200.000	33.150.000	89,11
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	76.630.400	62.059.013	80,98
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.601.800	3.571.000	99,14
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.689.400	18.051.200	96,59
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.793.500	3.657.500	96,41
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.609.300	4.592.500	99,64
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	2.852.400	2.386.250	83,66
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.084.000	29.800.563	69,17
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.084.800	128.809.533	92,61
	Pengadaan Mebel	14.841.900	14.800.000	99,72
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.377.100	48.100.000	97,41
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.762.700	180.690.545	86,55
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	67.008.340	52.778.593	78,76

	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.754.360	127.911.952	90,23
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139.084.800	128.809.533	92,61
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.486.600	34.527.800	97,30
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.189.000	27.902.300	95,59
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.976.500	16.910.000	94,07
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	53.432.700	46.469.433	86,97
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	751.725.800	745.100.000	99,12
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	742.400.000	738.200.000	99,43
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	742.400.000	738.200.000	99,43
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	9.325.800	6.900.000	73,99
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.325.800	6.900.000	73,99
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	92.899.400	89.862.000	96,73
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.176.600	55.780.000	95,88
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.746.800	6.142.000	91,04
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.429.800	49.638.000	96,52
3.2	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	34.722.800	34.082.000	98,15
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga,Warga dan Kelompok masyarakat	34.722.800	34.082.000	98,15

4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	358.562.200	347.579.000	96,94
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.693.600	13.592.000	99,26
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.693.600	13.592.000	99,26
4.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	344.868.600	333.987.000	96,84
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	344.868.600	333.987.000	96,84
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.887.200	14.678.400	98,60
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.887.200	14.678.400	98,60
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.887.200	14.678.400	98,60
	JUMLAH	4.159.923.854	3.650.618.618	87,76

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Gumukmas Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Gumukmas ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Gumukmas sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Gumukmas disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Gumukmas telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 6 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 6 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, dan sebanyak 0 indikator tidak mencapai target dengan kategori Sangat tinggi/sedang/rendah/sangat rendah

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Selalu Berkoordinasi dari semua pihak Stakeholder Tingkat Kabupaten, dinas/instansi terkait dan pihak dari masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Gumukmas;
2. Memenuhi Kebutuhan Sarana dan prasarana yang di butuhkan;
3. Semangat pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik
4. Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
5. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program Pemberdayaan
6. Meningkatkan keterampilan Masyarakat agar dapat memberikan penghasilan.
7. Memiliki pemikiran yang kreatif dan fleksibel.
8. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Pelatihan yang intensif bagi petugas pelayanan publik untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Melaksanakan monitoring untuk memberikan dorongan, membangun rasa percaya diri Masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan kemandirian

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Gumukmas yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

Lampiran 1

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GUMUKMAS
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik					3,5	3,75	4	4			
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat			85	90	95	98	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pendekatan humanis, percepatan pelayanan, maupun	Memberikan pelayanan secara prima dengan lebih humanis dan meningkatkan sarpras pelayanan, mempercepat pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi,	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

											pemanfaatan teknologi informasi	dan memberikan purna layanan dengan baik.	
			Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan			80	84	86	88	Fasilitasi Peningkatan Usaha Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan produk unggulan setiap desa	Fasilitasi Pemberian pelatihan UMK dengan memperhatikan produk unggulan masyarakat desa, hingga pemasarannya.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat			100	100	100	100	Penegakan Perda dan Perbup atau peraturan perundangan lainnya.	Sosialisasi dan penertiban yang dilakukan melalui pendekatan humanis.	1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2. Program Penyelesaian Urusan Pemerintahan

						80	80	83	85	88			Umum
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	OPD Nilai Sakip											
			Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai			100	100	100	100	Peningkatan kualitas SDM Aparatur.	Pengikutan bimtek dan diklat sesuai tugas masing-masing ASN serta pembinaan di bidang kepegawaian secara berkala	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN GUMUKMAS**

JL. ACH. YANI NO.224 ☎ (0336) 321042 GUMUKMAS 68165

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NINO EKA PUTRA WAHYU RAMADHONI, S.STP, M.Si

Jabatan : Camat Gumukmas Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Pihak Pertama
CAMAT GUMUKMAS,



NINO EKA PUTRA WAHYU R.,S.STP,M.Si
NIP. 19840624 200212 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER

NO (1)	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	84%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	BB (80)
6	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.941.849.254	APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 751.725.800	APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 92.899.400	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 358.562.200	APBD
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 14.887.200	APBD
Jumlah	Rp. 4.159.923.854	

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Pihak Pertama
CAMAT GUMUKMAS,



NINO EKA PUTRA WAHYU R., S.STP, M.Si
NIP. 19840624 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN GUMUKMAS
 JL. ACH. YANI NO.224 ☎ (0336) 321042 GUMUKMAS 68165

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024

Nama PD/ Unit Kerja : KECAMATAN GUMUKMAS
RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat, dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Repormasi Birokrasi	Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah (SOTK, Probis, Anjap/ABK, Evaluasi Jabatan dan SOP)

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase realisasi anggaran	90%				

		Kecamatan			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	742.400.000
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	100%	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.325.800
		Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	84%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	84%				
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 Laporan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	51.429.800
								Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	6.746.800

					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang	10 Keluarga	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga	34.722.800
	Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan pengamanann umum di tingkat kecamatan	100%					
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	344.868.600	

					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	13.693.600
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	85%				
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penugasan Urusan Pemerintahan Umum	6 Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	14.887.200
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai Sakip OPD	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	100%				

				Perencanaan, Pengagaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengagaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.042.500
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	14 Dokumen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.296.003.854
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115.500.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.406.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar kantor yang disediakan	12 Laporan	141.754.360	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	67.008.340	

					Pemeliharaan Barang Daerah Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.486.600
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	29.189.000
								Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilit asi	4 Unit	53.432.700
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	17.976.500

					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan ya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	37.200.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	3.601.800
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.689.400	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.793.500	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.609.300	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.852.400	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	43.084.000	

					Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Milik	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Unit	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	14.841.900
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	49.377.100


 29 Januari 2024
 KECAMATAN GUMUKMAS
NINO ERIC PUTRA WIDHY RAMADHONI, S.STP, M.Si
 NIP: 198406242002121001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN GUMUKMAS
JALAN RAYA A YANI NO. 224 TELP. 0336-321042
G U M U K M A S

KEPUTUSAN CAMAT GUMUKMAS
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ *24*/35.09.04/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Gumukmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Gumukmas Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Camat Gumukmas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gumukmas
pada tanggal : 29 Januari 2024



NINO EKA PUTRA WAHYU RAMADHONI, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19840624 200212 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Kecamatan Gumukmas
- Tugas :
- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - g. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
- Fungsi :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. penanganan konflik sosial;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Gumukmas

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN GUMUKMAS**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	- Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			penyelesaian <ul style="list-style-type: none"> • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Formulasi Kegiatan : $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$ Penjelasan : - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			penyaluran bantuan bahan /alat		
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. $\frac{\text{Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator: - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Laporan ataupun media sosial kecamatan.</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan indikator:</p> <p>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP PD yang nilainya dilakukan oleh Evaluator Kabupaten Jember</p> <p>2. Katagori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada permenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan pedoman evaluasi internal di Pemkab Jember</p>	- Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) PD
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

CASCADING KECAMATAN GUMUKMAS

RPJMD Kab. Jember 2021-2026	VISI : SUDAH WAKTUNYA MEMBENAI JEMBER (WES WAYAHE MBENAI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM						
MISI 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif,legeslatif dan komponen pembangunan daerah lainnya							
Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.							
Sasaran 4 : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas							
Tujuan dan Sasaran Kecamatan	Tujuan 1: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. (Indikator: Nilai SAKIP OPD), Sasaran 1: Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Persentase Indikator Program yang tercapai (Target : 100%)		Tujuan 2: Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. (Indikator : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, Target : 4 Dok) Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (Target : 85)			Pengampu : Kecamatan Gumukmas	
Program dan Indikator Program	Program : PROGRAM PEMBUNYING URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBARA Indikator : Persentase realisasi anggaran (Target : 100%)		Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator : Persentase realisasi anggaran (Target : 85)	Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator : Cakupan pemberdayaan desa dan Kelurahan (Target : 85)	Program : PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator : Terlaksananya koordinasi ketertaman dan pengamanann umum di tingkat kecamatan (Target : 100%)		Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan (Target : 85%)
Kegiatan dan indikator Kegiatan	Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Pelayanan Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Seksi Ketertaman dan Keterbiban Umum		Seksi Pemerintahan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Keterbiban Umum		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Target 9 Dok.)	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Target 4 Lap.)	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Target 100 %)	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa (Target 100 %)	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Ketertaman dan Keterbiban Umum (Target 100 %)	Jumlah Penugasan Urusan Pemerintahan Umum (Target 18 Tugas)	
	Administrasi Keuangan	Administrasi Kepegawaian	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (Target 12 Lap.)	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian (Target 1 Dok.)	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan (Target 100%)	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat difasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan (Target 100%)	Persentase Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah (Target 100%)		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Target 1 Lap.)					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					
		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Target 1 Lap.)					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Target 12 Lap.)					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Target 12 Lap.)					


 NINO EKA PUTRA WAHYU R, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 198406242002121001